

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA KUALA KILAN
KECAMATAN BATANG CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sastra Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Rifky Hardian Pratama
NPM : 157110249

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

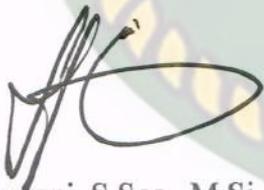
Nama : Rifky Hardian Pratama
NPM : 157110249
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam
Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan
Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

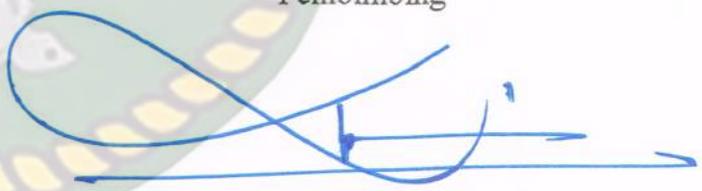
Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 14 Desember 2020

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Ketua

Pembimbing


Lilis Suryani, S.Sos., M.Si


Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Rifky Hardian Pratama
NPM : 157110249
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenuku Kabupaten Indragiri Hulu

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 14 Desember 2020

Ketua



Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA

An. Tim Penguji
Sekretaris



Evi Zubaidah, S.Sos.I.MPA

Anggota



Drs. Zulkifli, M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

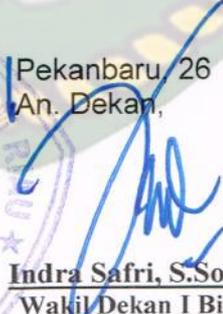
BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1202/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 25 November 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 26 November 2020 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Rifky Hardian Pratama
NPM : 157110249
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pembedayaan Masyarakat Di Desa Kualu Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu**
Nilai Ujian : Angka : " 80 " ; Huruf : " B+"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA	Ketua	1. 
2.	Evi Zubaidah, S.Sos.I.MPA	Sekretaris	2. 
3.	Drs. Zulkifli, M.Si	Anggota	3. 
4.		Notulen	4. 

Pekanbaru, 26 November 2020
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1202/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Rifky Hardian Pratama
N P M : 157110249
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kualu Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

Struktur Tim :

1. Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Evi Zubaidah, S.Sos.I.MPA Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Drs. Zulkifli, M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 25 November 2020
Dekan

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. A r s i p -----sk.penguji-----

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rifky Hardian Pratama
NPM : 157110249
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

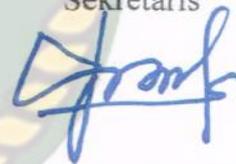
Pekanbaru, 14 Desember 2020

Ketua



Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA

An. Tim Penguji
Sekretaris



Evi Zubaidah, S.Sos.I.MPA

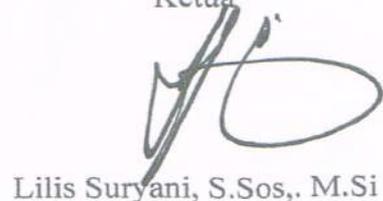
Turut menyetujui,

Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Administrasi Publik
Ketua



Lilis Suryani, S.Sos., M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifky Hardian Pratama
NPM : 157110249
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Sastra Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Desember 2020

Pelaku Pernyataan,



Rifky Hardian Pratama

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang tak terhingga penulis ucapkan, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk usulan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu”**. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin demi kesempurnaan penyusunan Usulan Penelitian ini. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Usulan Penelitian ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan yang tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman, kritik dan saran serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari bhwasannya dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Usulan Penelitian ini banyak pihak turut membantu, sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan banyak terimalasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Lilis Suryani, S.Sos., M.Si sebagai Ketua Prodi Administrasi Publik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA sebagai Pembimbing dan selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Usulan Penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian dengan teliti sebagaimana seharusnya penulisan Usulan Penelitian dan telah menyediakan waktu serta memberikan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Khususnya Jurusan Administrasi Publik yang telah memberikan pembelajaran dari wawasan yang beliau-beliau berikan selama masa perkuliahan aktif.
6. Terima kasih yang tulus Ananda kepada ayahanda Suhardi, SE, ibunda tercinta Siti Muyassaroh dan adinda Vika Yurizka Nurliasary yang telah memberikan do'a yang teramat tulus, kasih sayangnya, serta dukungannya dalam meraih gelar sarjana strata satu (S1) bidang Ilmu Administrasi Publik.
7. Terimakasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada rekan-rekan sepermainan Tri Oktapani, Leoney Ananda, Karma Sanjaya, Nur Widiya Saputra, Mardi, Fharadila Anwar dan Septia Rima Ariza yang telah

memberikan banyak masukan serta semangat dalam mewujudkan Usulan Penelitian ini. Terimakasih sudah banyak menemani dalam proses penyelesaian dan saat-saat direpotkan.

8. Dan kepada yang lainnya yang sama-sama menggali ilmu dibangku kuliah khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membeikan saran, masukan, dan dukungan terhadap penyelesaian Usulan Penelitian ini.

Penulis memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau yang berperan dalam penyelesaian usulan penelitian ini selalu diberikan rahmat dan karunia yang setimpal dengan apa yang telah Beliau berikan kepada penulis. Aamiin.

Akhir kata penulis berharap semoga Usulan Penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 14 Desember 2020

Penulis,

Rifky Hardian Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Kegunaan Penelitian.....	12

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	12
A. Studi Kepustakaan.....	12
1. Konsep Administrasi.....	12
2. Konsep Organisasi	15
3. Konsep Manajemen	16
4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia	17
5. Konsep Pelaksanaan.....	19
6. Konsep Administrasi Pembangunan	23
7. Konsep Pembangunan.....	25
8. Konsep Pemberdayaan.....	31
B. Kerangka Pikir	37
C. Hipotesis	39
D. Konsep Operasional	39
E. Operasionalisasi Variabel	42
F. Teknik Pengukuran	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Tipe Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Populasi dan Sampel	48
D. Teknik Penarikan Sampel.....	49
E. Jenis dan Sumber Data	50
F. Teknik Pengumpulan Data	50
G. Teknik Analisis Data.....	52

H. Jadwal Waktu Kegiatan	52
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian	53

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN..... 55

A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu	55
B. Gambaran Umum Kecamatan Batang Cenaku	58
C. Gambaran Umum Desa Kuala Kilan.....	60
1. Sejarah Desa Kuala Kilan	60
2. Demografi Desa Kuala Kilan	61
3. Keadaan Penduduk Desa Kuala Kilan	62
4. Pembagian Wilayah Desa.....	64
5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	64

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 66

A. Identitas Responden	66
1. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur	66
2. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	67
3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	68
B. Hasil dan Pembahasan Pelitian	69
a. Proses Penelitian Pemberdayaan Masyarakat	69
b. Pencapaian Pemberdayaan Masyarakat	83
c. Hambatan Pemberdayaan Masyarakat	85

BAB VI PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR KEPUSTAKAAN	89



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

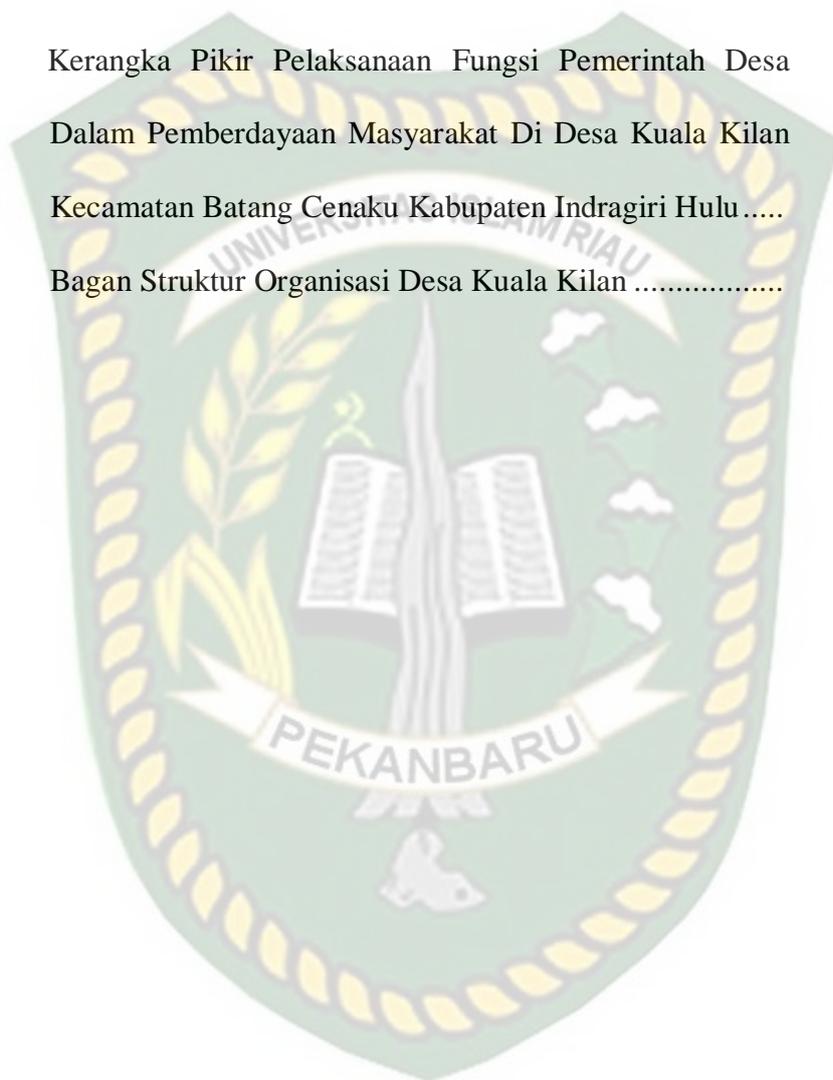
Tabel	Halaman
II.1 : Variabel Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku	42
III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Untuk Pemerintah Desa, Bidang Pemberdayaan dan Masyarakat diberdayakan Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat	49
III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu	53
V.1 : Identitas Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Tingkat Umur	67
V.2 : Identitas Responden Tentang Analisis Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Jenis Kelamin	68

V.3	: Identitas Responden Tentang Analisis Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	69
V.4	: Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Indikator Pendekatan dari Bawah	71
V.5	: Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Indikator Partisipasi	73
V.6	: Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Indikator Keterpaduan.....	76
V.7	: Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Indikator Keuntungan Sosial dan Ekonomi	78

V.8	: Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Indikator Konsep Keberlanjutan.....	81
V.9	: Rekapitulasi Tanggapan Jawaban Responden Perindikator Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu	38
VI.1 : Bagan Struktur Organisasi Desa Kuala Kilan	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 : Daftar Kuisisioner Responden Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu	92
2 : Surat Rekomendasi No: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/58536 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Prariset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi Atas Nama Rifky Hardian Pratama.....	98
3 : Surat Keterangan No: 140/SK/KL/III/2020/38 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data Untuh Bahan Skripsi Atas Nama Rifky Hardian Pratama	99
4 : SK Dekan FISIPOL UIR Nomor: 27/UIR-Fs/Kpts/2019 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Atas Nama Rifky Hardian Pratama	100
5 : Data Telly Responden Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.....	101
6 : Dokumentasi Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di	

Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten

Indragiri Hulu

102



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

**PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA KUALA KILAN
KECAMATAN BATANG CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

ABSTRAK

Rifky Hardian Pratama

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu: Untuk menganalisis proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Untuk melihat hasil dan pencapaian pemberdayaan masyarakat di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dan Untuk mencari hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pemberdayaan dalam bidang sosial adanya bank sampah yang telah berjalan dengan baik, meskipun partisipasi masyarakat masih kurang, Pemberdayaan dalam bidang ekonomi adanya koperasi unit desa dalam usaha fotokopi dan pom minyak bensin mini dan Lembaga pemberdayaan masyarakat masih belum memahami tugas dan fungsinya sehingga kepala desa langsung yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian adalah: Masih banyak masyarakat yang tidak datang dalam rapat desa, sehingga membuat terbatasnya gagasan yang diterima oleh pemerintah desa dan proses kelanjutan dalam pemberdayaan berjalan lambat, Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa serta minimnya partisipasi dari masyarakat dalam pemberdayaan dikarenakan masyarakat di Desa Kuala Kilan kurang peduli dengan pembangunan di desanya, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan membuat pelaksanaan pembangunan desa terutama dibidang pemberdayaan tidak berjalan dengan baik dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat belum memahami tugas dan tanggung jawabnya, sehingga kebijakan dan strategi pemberdayaan masyarakat berjalan lambat.

Kata Kunci: Pelaksanaan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat

IMPLEMENTATION OF VILLAGE GOVERNMENT FUNCTION IN COMMUNITY EMPOWERMENT IN KUALA KILAN VILLAGE, BATANG CENAKU SUB-DISTRICT, INDRAGIRI HULU DISTRICT

ABSTRACT

Rifky Hardian Pratama

This research has a purpose, namely: To analyze the process of community empowerment carried out by the government of Kuala Kilan Village, Batang Cenaku District, Indragiri Hulu Regency, To see the results and achievements of community empowerment in Kuala Kilan Village, Batang Cenaku District, Indragiri Hulu Regency and To look for obstacles in the Implementation of the Function of the Village Government in Community Empowerment in the Village of Kuala Kilan, Batang Cenaku District, Indragiri Hulu Regency. This study uses a quantitative approach. Data collection is done by means of observation, questionnaires, interviews and documentation. The results showed that: Social empowerment in the presence of a garbage bank that has been going well, although community participation is still lacking, Economic empowerment in the presence of village unit cooperatives in the buisness of photocopying and mini petrol stations and Community empowerment institutions still do not understand their duties and functions so that the village head directly carries out community empowerment. The conclusions of the study are: There are still many people who did not come to the village meeting, thus limiting ideas received by the village government and the process of continuing empowerment was slow, The low awareness of the community to attend meetings held by the Village Government and the lack of community participation in empowerment because the people in Kuala Kilan Village are less concerned with the development in their village, and the lack of community participation in development planning makes the implementation of village development especially in the field of empowerment not going well and Community Empowerment Institutions do not yet understand their duties and responsibilities, so that community empowerment policies and strategies are slow.

Keywords: Implementation of Development, Community Empowerment

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan Negara Republik Indonesia memiliki tujuan yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4 yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Amanat tersebut bermakna bahwa Indonesia memiliki tugas yang sangat penting salah satunya yaitu mensejahterakan kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat secara luas berarti sejahtera disegala bidang kehidupan baik itu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Dalam hal untuk mewujudkan tujuan negara yang sejahtera melalui sistem pemerintahan negara yang baik, maka pemerintah daerah yaitu Provinsi Riau memiliki tujuan memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa agar mampu berperan sebagai lini terdalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat perdesaan. Hal ini dapat tercapai bila ada keterpaduan dengan pemerintah kabupaten.

Untuk mewujudkan tujuan provinsi, maka pemerintah kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu memiliki tujuan memberdayakan kekuatan ekonomi

yang berbasis kerakyatan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas manajemen, permodalan, produksi dan peningkatan kemampuan dalam mengakses sumber-sumber bahan baku, teknologi, pasar dan faktor lainnya.

Adapun didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut (Sumitro, 2002) mengemukakan otonomi sebagai suatu kewenangan yang lebih mandiri dan bersifat lebih homogen dan integral yang diberikan kepada masing-masing daerah dalam rangka menciptakan kemandirian kesatuan wilayah pemerintahan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah dengan lebih berorientasi kepada kondisi daerah dan tuntutan kebutuhan masyarakat daerah setempat.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat bermukim di perdesaan dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintah desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem

penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dimana desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Adapun didalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut (Widjaja, 2003) otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut. Pembangunan desa akan semakin menantang dimasa depan dengan kondisi perekonomian global yang semakin terbuka menuntut kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai saat ini masih belum beranjak dari profil lama yakni terbelakang dan miskin.

Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun hal yang lainnya. Padahal kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berdiam didaerah perdesaan dan berprofesi sebagai petani dan nelayan dan sebagian besar hidup mereka masih termajinalkan serta hidup dibawah garis kemiskinan.

Bila hal ini tidak dicermati dengan baik oleh pemerintah baik pemerintah di pusat atau pemerintah yang ada di daerah maka hal ini bukan saja berdampak tidak baik khususnya bagi masyarakat yang hidup di wilayah perdesaan namun secara tidak langsung akan memburuk kondisi masyarakat desa yang diakibatkan oleh adanya persaingan global tersebut. Oleh karena itu sudah sewajarnya bila pembangunan perdesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. (Hernowo, 2004).

Dalam menghadapi permasalahan tersebut khususnya dalam upaya pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan, maka saat ini dibentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mempunyai mandat untuk menjalankan NAWACITA Jokowi-JK, khususnya NAWACITA Ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa”. (Prananda, 2018)

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan oleh potensi yang dimiliki desa, kemandirian dan semangat gotong royong yang selama ini telah tumbuh dan mendarah daging dalam budaya masyarakat desa sehingga berbagai program pembangunan dari pemerintah lebih cepat tersampaikan dan terealisasi dengan baik.

Konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi Desa untuk menampilkan organisasi Desa yang kuat dan kompetitif, maka proses penguatan tersebut memerlukan daya dukung tersedianya dana yang cukup. Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan tersebut pada pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa: “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”

Dalam menjalankan pemerintahannya, sebuah desa dipimpin oleh Kepala Desa seperti yang tertulis didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 disebutkan bahwa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Dalam mengembangkan desa, Pemerintah Desa memiliki wewenang seperti yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 disebutkan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Selanjutnya didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kemudian didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (4) dijelaskan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dari penjelasan tersebut, salah satu kewajiban Pemerintah Desa terutama Kepala Desa yaitu memberdayakan masyarakat di desa.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Desa Kuala Kilan sudah berdiri sejak tahun 1968. Warga Desa Kuala Kilan merupakan warga pribumi yang terdiri dari berbagai macam suku bahasa, seperti suku Melayu, Minang, Jawa dan sebagainya. Masyarakat Desa Kuala Kilan mayoritas beragama Islam dengan profesi penduduknya sebagai petani karet dan sawit.

Jika dilihat dari Tipologi Desa, Desa Kuala Kilan termasuk dalam kategori Desa Berkembang. Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Pasal 1, Ayat (15) dijelaskan bahwa Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa). Selanjutnya Ayat (18) dijelaskan bahwa Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Selanjutnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, Pasal 7 Ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Ayat (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. Pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
- e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
- h. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
- i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. Pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Dalam kegiatan pemberdayaan, masyarakat memiliki kedudukan yang penting, yang mana masyarakat sebagai penerima atau peserta yang semestinya terlihat dari kegiatan pemberdayaan yang bertujuan untuk pengembangan sistem sosial di Desa Kuala Kilan.

Dalam melakukan perencanaan dalam pembangunan desa, pemerintah Desa beserta semua elemen masyarakat desa harus mengetahui latar belakang, arah dan sasaran pemberdayaan, kebutuhan desa dan juga potensi desa dalam memberdayakan masyarakat.

Adapun fenomena yang diamati dari proses pemberdayaan di Desa Kuala Kilan selama ini adalah:

1. Masih rendahnya peran pemerintah desa dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat di Desa Kuala Kilan.
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

Dari permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih tentang: **“Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam

Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu”. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

- a. Untuk menganalisis proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Untuk melihat hasil dan pencapaian pemberdayaan masyarakat di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu
- c. Untuk mencari hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu untuk mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan ilmu administrasi, khususnya dibidang Ilmu Administrasi Publik.
- b. Kegunaan Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Kegunaan Akademis, yaitu penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan atau bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian pada bidang dan kasus yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan karya ilmiah atau suatu penelitian diperlukan konsep landasan atau pijakan sebagai pedoman untuk mengemukakan dan memahami permasalahan penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini. Selanjutnya dapat dilihat konsep teori yang berhubungan dengan penelitian serta akan diuraikan beberapa teori yang digunakan dalam penulisan ini.

1. Konsep Administrasi

Menurut Dimock & Dimock dalam (Pasolong, 2014) administrasi merupakan suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Administrasi juga mementingkan aspek-aspek konkrit dari metode-metode dan prosedur-prosedur manajemen.

Siagian dalam (Zulkifli, 2009) administrasi sebagai kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya didalam organisasi, Dan organisasi merupakan wadah dimana pemimpin melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, menurut The Liang Gie (Zulkifli, 2009) administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama mencapai tujuan tertentu.

Adapun dimensi unsur-unsur administrasi menurut (Pasolong, 2014) ada tiga yaitu:

- a. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan
- b. Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun swasta
- c. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.

Atmosudirjo dalam (Zulkifli, 2009) juga menjelaskan bahwa kerjasama manusia dalam mencapai tujuan, sebagai objek studi ilmu administrasi terdapat sepuluh dimensi penting yang perlu dipahami dalam konsep administrasi yaitu:

- a. Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu dalam masyarakat modern. Eksistensi dari pada administrasi berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi terdapat didalam organisasi.
- b. Administrasi merupakan suatu hayat atau kekuatan yang memberikan hidup atau gerak kepada suatu organisasi. Tanpa administrasi yang sehat maka organisasi tidak akan sehat pula. Pembangkit administrasi sebagai suatu kekuatan atau energi atau hayat adalah 'administrator' yang harus pandai mengerakkan seluruh sistemnya yang terdiri atas manajer, staffer, dan personilnya.
- c. Administrasi merupakan suatu fungsi yang tertentu untuk mengendalikan, menggerakkan, mengembangkan, dan mengarahkan suatu organisasi yang dijalankan oleh administrator dibantu oleh bawahannya, terutama para manajer dan staffer.
- d. Administrasi merupakan suatu kelompok orang-orang yang secara bersama-sama merupakan 'badan pimpinan' dari pada suatu organisasi.
- e. Adminitrasi merupakan suatu seni (art) yang merupakan bakat, ilmu pengetahuan dan pengalaman.
- f. Adminitrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama antara sekelompok orang-orang tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya. Kerjasama orang-orang tersebut berlangsung secara dan melalui organisasi.
- g. Adminitrasi merupakan suatu jenis tingkah laku atau sikap kelakuan sosial yang tertentu (administrative behaviour or administration as special type of social behaviour) yang memerlukan sikap dan mental tertentu serta merupakan suatu type tingkah laku manusia tertentu (special type of behaviour).
- h. Administrasi merupakan suatu teknik atau praktek yang tertentu, suatu tatacara yang merupakan kemampuan atau mengerjakan sesuatu yang memerlukan kemampuan atau mengerjakan kemampuan, kemahiran, keterampilan, yang hanya diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.
- i. Adminitrasi merupakan suatu sistem yang tertentu, yang merupakan input, transpormasi, pengelolaan dan output tertentu.
- j. Administrasi merupakan suatu menejemen tertentu yang merupakan 'overall management' dari suatu organisasi. Pada hakekatnya manajemen merupakan pengendalian dari sumberdaya-sumberdaya menuju

tercapainya suatu prapta (objective) tertentu. Sumberdaya-sumberdaya (resources) dimaksud meliputi : orang-orang (man), uang (money), mesin-mesin (machines), bahan atau peralatan (material), tenaga atau energi (energy), dan waktu (time). Dalam istilah administrasi tecangkup adanya pesan, tugas dan tanggung jawab,dan kepercayaan yang diberikan oleh para pemilik organisasi.

Alternatif prinsip-prinsip umum administrasi yang dijumpai dalam referensi ilmu administrasi, Fayol dalam (Zulkifli, 2005) mengemukakan terdapat 14 prinsip umum administrasi yaitu:

- a. Pembagian kerja
- b. Pendelegasian dan wewenang
- c. Disiplin
- d. Kesatuan perintah
- e. Kesatuan arah dan tujuan
- f. Mendahulukan atau mengutamakan atau menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi
- g. Pengupahan atau penggajian
- h. Sentralisasi
- i. Skala hierarki
- j. Tata tertib
- k. Keadilan
- l. Stabilitas jabatan
- m. Prakarsa atau inisiatif
- n. Solidaritas sekelompok kerja

Selain dari prinsip-prinsip umum administrasi perlu kita pahami bahwasanya terdapat unsur-unsur adminisrasi. Menurut (Syafri, 2012) unsur-unsur administrasi itu memiliki 8 bagian yaitu:

- a. Organisasi
- b. Manajemen
- c. Komunikasi
- d. Kepegawaian
- e. Keuangan
- f. Perbekalan
- g. Tata usaha
- h. Hubungan masyarakat

Dari beberapa definisi administrasi di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan kegiatan yang sistematis karena melibatkan beberapa unsur penting untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

2. Konsep Organisasi

Administrasi dan organisasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena kegiatan administrasi mengarahkan pada pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Menurut (Rivai & Mulyadi, 2012) dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memerlukan manusia lain. Usaha untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan tersebut dengan membentuk hubungan kerja sama dan selanjutnya membentuk kelompok-kelompok.

Organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri. Organisasi merupakan suatu unit terkoordinasi yang terdiri setidaknya dua orang, berfungsi mencapai satu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran (Rivai & Mulyadi, 2012).

Siagian dalam (Zulkifli, 2009) mendefinisikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif sekelompok orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksana tugas (Zulkifli, 2009).

Menurut (Siagian, 2008), terdapat dua belas prinsip organisasi yang dapat dijadikan pedoman sehingga organisasi menjadi tumbuh dan berkembang. Adapun prinsip-prinsip itu ialah:

- a. Terdapat tujuan yang jelas
- b. Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap orang didalam organisasi
- c. Tujuan organisasi harus diterima oleh setiap orang dalam organisasi
- d. Adanya kesatuan arah (unity of direction)
- e. Adanya kesatuan perintah (unity of command)
- f. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang)
- g. Adanya pembagian tugas
- h. Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin
- i. Pola dasar organisasi harus relatif
- j. Adanya jaminan jabatan
- k. Imbalan yang diberikan pada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan.

Dari beberapa definisi organisasi di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan wadah kegiatan-kegiatan administrasi dan rangkaian hierarki dan interaksi antara orang-orang didalamnya.

3. Konsep Manajemen

Manajemen pada hakekatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi.

Secara garis besar, manajemen ada untuk menjalankan organisasi dengan sistem yang terstruktur dan mengarahkan kegiatan kepada pembagian kerja yang tersistem.

(Simamora, 2001) mengatakan bahwa manajemen adalah proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan.

Manajemen menurut Stoner & Wankeld dalam (Pasolong, 2014), mengatakan bahwa manajemen secara harfiah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota

organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Donovan dan Jackson dalam (Pasolong, 2014), mendefinisikan manajemen sebagai proses yang dilaksanakan pada tingkat organisasi tertentu, sebagai rangkaian keterampilan (*skills*), dan sebagai serangkaian tugas.

Secara garis besar, manajemen dapat dipandang dari dua arti yaitu manajemen sebagai seni dan ilmu. Arti manajemen sebagai ilmu dan seni didasarkan pada pandangan yang menyatakan bahwa seorang ilmuwan sekaligus seniman, karena disamping mengandalkan diri pada ilmu, ia juga harus mempunyai firasat, keyakinan, kreativitas, dan menguasai cara-cara penerapannya.

Dari beberapa definisi manajemen di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu rangkaian proses yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Karena manajemen merupakan akumulasi dari kemampuan dan keahlian dalam mencapai tujuan organisasi.

4. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia yang dijelaskan oleh Simamora (Sutrisno, 2014) ialah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja.

Menurut Dessler (Sutrisno, 2014) manajemen Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang yang menjalankan aspek “orang” atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian.

Sedangkan Umar (Sutrisno, 2014) menjelaskan manajemen Sumber Daya

Manusia menurut tugasnya dapat dikelompokkan atas tiga fungsi yaitu:

- a. Fungsi Manajerial: Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, dan Pengendalian
- b. Fungsi Operasional: Pengadaan, Pengembangan, Kompensasi, Pengintegrasian, Pemeliharaan, dan Pemutusan hubungan kerja
- c. Fungsi ketiga ialah kedudukan manajemen sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu

Sementara menurut Schuler et al. (Sutrisno, 2014), setidaknya MSDM

memiliki tiga fungsi utama yaitu:

- a. Memperbaiki tingkat produktifitas
- b. Memperbaiki kualitas kehidupan kerja
- c. Meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal

Menurut (Hasibuan, 2014) Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Fungsi manajemen sumber daya manusia yang dikemukakan oleh (Hasibuan, 2014) antara lain sebagai berikut:

- a. Perencanaan (*human resources planning*) adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan.
- b. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi (*organization chart*).
- c. Pengarahan (*directing*) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.
- d. Pengendalian (*controlling*) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.

- e. Pengadaan (*procurement*) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
- f. Pengembangan (*development*) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.
- g. Kompensasi (*compensation*) adalah pemberian balas jasa langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.
- h. Pengintegrasian (*integration*) adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.
- i. Pemeliharaan (*maintenance*) adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun.
- j. Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.
- k. Pemberhentian (*separation*) adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari perusahaan.

Dari beberapa definisi manajemen sumber daya manusia di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang manager harus mampu mengarahkan para anggota dalam organisasi agar setiap kebijakan yang dirumuskan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

5. Konsep Pelaksanaan

Pelaksana berasal dari kata laksana yang berarti bautan, sifat, dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran -an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Sedangkan, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarmita (2003), mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan. Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha)

melaksanakan rancangan. Berdasarkan batasan dikemukakan oleh Purwadarmita diatas, maka jelas dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana. Jadi, dengan demikian pengertian tersebut diatas mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal dari kata laksana.

Sedangkan pengertian pelaksanaan menurut The Liang Gie sebagai berikut: Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan (The Ling Gie, 2003).

Santoso Sastropetro, mengemukakan bahwa Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Kemudian (Siagian, 2003) menyatakan bahwa jika suatu rencana terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang "*achievement oriented*" telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya. Lebih lanjut, Siagian mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu.
2. Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-sumber.
3. Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.

4. Review artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan dan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan penyimpangan.

Pressman dan Wildavsky dalam (Tachjan, 2006) mengemukakan bahwa implementasi maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan dan melengkapi. Jadi secara etimologi implementasi (pelaksanaan) itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Fungsi dan tujuan implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik dapat diwujudkan sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Maksudnya, sebagai suatu sistem penyampaian/penerusan kebijakan. Sebagai suatu sistem, implementasi terdiri dari unsur-unsur dan kegiatan-kegiatan yang terarah menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki (Tachjan, 2006).

Pelaksanaan kebijakan yang berprespektif *top down* dikembangkan oleh George C. Edward III dalam (Ali dan Hafis, 2015). Edward III menamakan model pelaksanaan kebijakan publiknya dengan *direct and indert impact on implementation*. Dalam pendekatan yang diteorinamakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi, komunikasi yang baik salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Pelaksanaan yang mencapai sasaran kebijakan tercipta jika para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Hal tersebut akan terlaksana bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap kebijakan yang akan dilaksanakan tersebut bisa dikoordinasikan dengan bagian yang tepat, selain itu juga komunikasi terkait kebijakan yang akan dilaksanakan tersebut juga harus akurat dan konsisten. Ada tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu:
 - a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu pelaksanaan yang baik. Yang sering kali terjadi dalam proses penyaluran komunikasi yaitu adanya miskomunikasi, sehingga kebijakn yang dibuat sedemikian rupa terdistorsi saat sampai pada posisi tertentu.

- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Karena apabila tidak jelas akan bisa berdampak pada penyelewengan kebijakan.
 - c. Konsistensi, komunikasi yang disampaikan haruslah konsisten dan jelas. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka akan terjadi kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan.
2. Sumber Daya, sumber daya merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III, dalam pelaksanaan kebijakan ada beberapa indikator yang untuk mengukur sumber daya, yaitu:
 - a. Staf, sumber daya yang penting dalam pelaksanaan kebijakan yaitu staf, diantara beberapa penyebab terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai dan bahkan tidak berkompeten dibidangnya. Oleh karena itu, sumber daya yang kompeten dan kapabel yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kebijakan.
 - b. Informasi, pada pelaksanaan kebijakan publik, informasi terbagi menjadi dua bagian, pertama informasi yang berhubungan dengan cara pelaksanaan kebijakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksanaan terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
 - c. Wewenang, kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Wewenang juga dapat membuat legitimasi para pelaksana dimata publik, sehingga para pelaksana dapat melaksanakan kebijakan yang telah dibuat.
 - d. Fasilitas, fasilitas fisik diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Keberadaan staf yang berkompeten, mengerti yang sah dan formal serta diakui publik sebagai pelaksana kebijakan, tidak akan efektif jika tidak diberikan fasilitas pendukung.
3. Disposisi, disposisi atau sikap pelaksanaan kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Variabel disposisi menurut Edward III antara lain, yaitu:
 - a. Pengangkatan Birokrat, pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah mereka yang memiliki dedikasi terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan, terutama untuk kepentingan warga masyarakat.
 - b. Insentif, untuk mengatasi para kecendrungan para pelaksana kebijakan adalah dengan memanipulasi insentif. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu memungkinkan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan yang melaksanakan perintah dengan baik, dalam upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.
4. Struktur Organisasi, point terakhir menurut Edward III yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah struktur birokrasi. Jika semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia dengan baik, para pelaksanaan mengetahui apa yang harus dilakukan bahkan

berkeinginan untuk mewujudkan sebuah kebijakan yang telah diputuskan berkemungkinan kebijakan tersebut tidak terlaksana karena adanya kelemahan dalam struktur birokrasi. Sebuah kebijakan yang telah ditetapkan dan membutuhkan waktu yang panjang dalam proses perumusannya dan penuh dengan kompetisi serta permainan politik. Dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut membutuhkan keterlibatan banyak orang atau saling kerjasama. Apabila distruktur birokrasi tidak bisa menciptakan kondisi yang kondusif dengan kebijakan yang ada bagaimana mungkin kebijakan tersebut dapat berjalan dan terlaksana dengan efektif. Hal ini bisa menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

Dari rumusan diatas, dapat dirangkum bahwa pelaksanaan itu adalah suatu kegiatan dalam proses merealisasikan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan implementor dan suatu kelompok sasaran. Dengan demikian, pelaksanaan sebagai suatu kegiatan untuk merealisasikan tujuan terhadap sebuah sasaran sehingga suatu pelaksanaan akan mengarah kepada usaha yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

6. Konsep Administrasi Pembangunan

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah di ambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2009). The Liang Gie dalam (Pasolong, 2011) mendefenisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut (Bintoro, 1995) mengartikan administrasi pembangunan sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh Negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di berbagai bidang kehidupan bangsa untuk mendorong dan mendukung perubahan-perubahan suatu

masyarakat ke arah keadaan yang lebih baik di kemudian hari. Pada umumnya tujuan-tujuannya adalah pembinaan bangsa dan atau perkembangan sosial ekonomi.

Pembangunan menurut (Siagian, 2009) didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangkaian pembinaan bangsa (*nation-building*). Selanjutnya ia berpendapat paling sedikit tujuh ide pokok yang muncul dari definisi pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan, pembangunan dilakukan secara terencana baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek, rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan, pembangunan mengarah ke modernitas, modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan perdefinisi bersifat multi dimensional, semua hal yang disinggung di tujukan kepada usaha pembinaan bangsa.

Selanjutnya Todaro dalam (Suharto, 2006) mengemukakan bahwa sedikitnya pembangunan harus memiliki tiga tujuan yang satu sama lain saling terkait yaitu:

- a. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat.
- b. Men mencapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara material, melainkan juga untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian bangsa. Aspek ini meliputi peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan budaya serta nilai kemanusiaan.
- c. Memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang atau bangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan.

Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan pembangunan non fisik.

Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (Kuncoro, 2010). Pembangunan fisik berupa bangunan, infrastruktur, dan fasilitas umum. Sedangkan Pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama (Wresniworo, 2012). Dalam pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak dibidang pembangunan fisik tetapi juga harus bergerak dibidang pembangunan

non fisik atau sosial. Oleh karena itu, pembangunan hendaknya harus adanya keseimbangan antara pembangunan fisik ataupun non fisik. Yang menjadi bagian dari pembangunan non fisik atau sosial yaitu: pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan (Pramana, 2013).

Mostopadidjaya dalam (Afiffudin, 2010) menyatakan bahwa administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien. Contoh dari pembangunan fisik adalah:

- a. Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan
- b. Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar
- c. Prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah dan puskesmas.

Selanjutnya Mostopadidjaya dalam (Afiffudin 2010) menyatakan pembangunan non fisik adalah pembangunan yang tidak berwujud namun dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini sering disebut pembangunan masyarakat, yang berupa:

- a. Pembangunan bidang keagamaan
- b. Pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana
- c. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban
- d. Pelayanan terhadap urusan masyarakat seperti pembuatan KTP, pembuatan kartu keluarga dan pembuatan surat kelahiran
- e. Pembuatan surat keterangan domisili.

7. Konsep Pembangunan

Pembangunan masyarakat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, dimana mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah secara bersama (Adisasmita, 2006). Ada pula yang mengartikan bahwa

pembangunan masyarakat adalah kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Program-program masyarakat yang disusun (disiapkan) harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Perencanaan yang menyusun program-program pembangunan atau industri-industri yang membangun kegiatan usahanya di suatu daerah harus melakukan analisis kebutuhan masyarakat. Dalam melakukan analisis kebutuhan harus benar-benar dapat memenuhi kebutuhan (*Needs Analisis*), dan bukan sekedar membuat daftar keinginan (*list of Wants*) yang bersifat sesaat. Analisis kebutuhan harus dilakukan secara cermat agar dapat menggali kebutuhan-kebutuhan yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat banyak, bukan merupakan keinginan beberapa orang saja, apakah tokoh masyarakat, atau kepala desa yang mempunyai kewenangan menentukan keputusan. Dalam pembangunan masyarakat (*community development*) mengandung upaya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki (*participating and belonging together*) terhadap program yang dilaksanakan, dan harus mengandung unsur pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan masyarakat (pedesaan) pada masa yang lalu mendasarkan pada azas pemerataan yang penerapannya diarahkan secara sektoral dan pada setiap desa. Meskipun dana/anggaran/bantuan pembangunan pedesaan jumlahnya relative cukup besar, tetapi jika dibagi secara merata maka masing-masing desa memperoleh jumlah dana yang relative kecil, sehingga pemanfaatannya kurang berhasil (Adisasmita, 2006).

Dalam era reformasi terjadi pergeseran paradigma pembangunan dimana peran pemerintah bukan lagi sebagai “provider” (penyedia) tetapi sebagai

“enabler” (fasilitator). Peran sebagai enabler berarti tiap usaha pembangunan harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan masyarakat itu sendiri, yang berarti pula tidak terlalu mengharapkan pemberian bantuan dari pemerintah. Pembangunan masyarakat menurut Dirjen Bangdes pada hakekatnya merupakan proses dinamis yang berkelanjutan dari masyarakat untuk masyarakat untuk mewujudkan keinginan dan harapan hidup yang lebih sejahtera dengan strategi menghindari kemungkinan tersudutnya masyarakat sebagai pengguna akses dari pembangunan regional/daerah atau nasional. Pengertian tersebut mengandung makna betapa pentingnya inisiatif lokal, partisipatif masyarakat sebagai bagian dari model-model pembangunan yang dapat menyejahterakan masyarakat desa. Program pembangunan ini tidak berpusat pada birokrasi melainkan berpusat pada masyarakat atau komunitasnya sendiri. Pemberi kekuasaan pada inisiatif lokal dan partisipasi masyarakat menjadi kata kunci dalam pembangunan masyarakat.

Menurut (Adisasmita R. , 2006) ada lima prinsip yang harus diterapkan dalam pembangunan masyarakat desa yaitu:

1. **Transparansi**
Transparansi yaitu adanya keterbukaan dalam proses pembangunan. Menurut Lalolo (2003: 13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.
2. **Partisipatif**
Partisipasi menurut H.A.R. Tilaar (2009:287) partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.
3. **Dapat Dinikmati Masyarakat**
Dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan harus mampu menyelesaikan masalah publik. Sehingga, harus berorientasi pada

kepentingan masyarakat dan dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Indikator yang digunakan dalam melihat bahwa pembangunan yang berjalan dapat dinikmati masyarakat adalah melalui penilaian bahwa pembangunan yang ada harus sesuai dengan keinginan dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat sehingga mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat.

4. Akuntabilitas (Dapat Dipertanggungjawabkan)
Menurut Rasul (2002:8) akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.
5. Berkelanjutan (Sustainable)
Menurut Effendy dalam Wibawa (1991:14) Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang pemanfaatan sumber dayanya, arah investasinya, orientasi pengembangan teknologinya dan perubahan kelembagaannya dilakukan secara harmonis dan dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Tujuan Pembangunan Desa adalah untuk menaikkan taraf hidup masyarakat yang bersangkutan dan karena kita hidup berdasarkan Pancasila maka tidak mengherankan bila proses pembangunan tersebut juga harus berdasarkan nilai-nilai dalam Pancasila. Hubungan Partisipasi Masyarakat dengan Pembangunan Desa Suatu pembangunan akan berhasil jika masyarakat turut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena pembangunan merupakan suatu yang mengarah pada perubahan maka Bloom dan Fischer dalam (Adimihardja, 2004) mengemukakan bahwa ada beberapa hak masyarakat untuk mengetahui dan terlibat dalam setiap aspek perubahan, yaitu :

- a. Berhak mengetahui masalah apa yang ada (dari perspektif praktisi) dalam bahasa yang jelas dan dapat dimengerti.
- b. Berhak berpartisipasi dalam memilih tujuan dan sasaran.
- c. Berhak mengetahui apa yang akan terjadi selama proses intervensi, siapa yang melakukan, siapa melakukan untuk siapa dan dibawah kondisi apa?
- d. Berhak mengetahui berapa lama kegiatan paling lama dilakukan.
- e. Berhak mengetahui metode-metode alternatif dalam membahas permasalahan dan kemungkinan-kemungkinannya dalam memecahkan kesulitan yang terjadi.

- f. Berhak mengetahui seberapa besar kegiatan itu dapat membebani dan mengetahui nilai pelayanan yang tersedia.
- g. Berhak mengetahui catatan-catatan yang disimpan dan siapa yang boleh melihatnya.
- h. Berhak mengetahui lebih dahulu terminasi pelayanan.
- i. Berhak mengambil kendali atas kehidupan dan semampunya.
- j. Berhak menjadi bagian dari dan diinformasikan tentang evaluasi mengenai situasi dirinya, agar ia mendapat dan mengambil keputusan berdasarkan data tersebut.

Dari uraian di atas maka jelas bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat berperan. Hal ini berarti pelaksanaan pembangunan nasional tidak hanya merupakan tugas dari pemerintah. Pembangunan merupakan tugas dan tanggung jawab dari seluruh masyarakat. Dengan demikian pembangunan akan berhasil apabila melibatkan semua golongan dan lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan disamping bantuan ataupun prakarsa dari pemerintah.

Partisipasi rakyat, terutama rakyat pedesaan dalam pembangunan itu sebenarnya mengandung dua tipe yang pada prinsipnya yang berbeda, ialah:

1. Partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama dalam proyek-proyek pembangunan khusus.
2. Partisipasi sebagai individu diluar aktivitas-aktivitas bersama dalam pembangunan.

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia seutuhnya. Pembangunan masyarakat desa mengandung makna sebagai pembangunan dengan pendekatan kemasyarakatan, pendekatan pengorganisasian dan pelaksanaan diorientasikan pada inisiatif dan kreativitas masyarakat. Menurut Swalem dalam (Permana, 2001) Pembangunan desa pada hakekatnya adalah

bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa, sebagai usaha dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dari pemerintah oleh masyarakat desa dengan bantuan dan pembaharuan dari pemerintah pada unit pemerintahan terendah, yaitu pemerintah desa.

Target pembanguann desa yang obejktif adalah pembangunan yang jelas dan nyata sehinggaa menjadikan masyarakat yang tinggal di pedesaan akan semakin nyaman dan merasa tentram. Program pembangunan desa misalnya adalah:

1. Pembangunan dibidang sarana dan prasarana desa (infrastruktur) Pembangunan dibidang infrastruktur ini dimaksudkan untuk kelancaran segala bentuk aktifitas yang dilakukan oleh desa yang bersangkutan. Pembangunan infrastruktur di desa tersebut harus didasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga memungkinkan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaanya. Disisi lain infrastruktur yang di bangun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab dalam mengelola dan memelihara setelah proyek tersebut berakhir, dan didalam membangun infrastruktur desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat sehingga sumber daya yang di milki oleh desa yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien (Suriadi, 2005).
2. Pemberdayaan masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama (Suriadi, 2005). Menurut kodratnya, Manusia tidak dapat hidup menyendiri, Tetapi harus hidup bersama atau berkelompok dengan manusia yang lain yang dalam hubunganya saling membantu untuk dapat mencapai tujuan hidup menurut kemampuan dan kebutuhannya masing-masing atau dengan istilah lain adalah saling berinteraksi.

8. Konsep Pemberdayaan

Pembangunan masyarakat perdesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pula kepada pembangunan kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada suatu wilayah perdesaan (Adisasmita R. , 2006).

Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program / proyek pembangunan yang dikerjakan dimasyarakat lokal (Adisasmita R. , 2006).

Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat (perdesaan). Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya masyarakat perdesaan secara lebih efektif dan efisien (Adisasmita R. , 2006).

Menurut (Suyono, 2014) Pemberdayaan ditujukan agar klien/sasaran mampu meningkatkan kualitas kehidupannya untuk berdaya, memiliki daya saing, dan mandiri. Dalam melaksanakan pemberdayaan khususnya kepada masyarakat, agen pemberdayaan perlu memegang prinsip-prinsip pemberdayaan. Prinsip-prinsip ini menjadi acuan sehingga pemberdayaan dapat dilakukan secara benar. Mengacu pada hakikat dan konsep pemberdayaan, maka dapat diidentifikasi beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan dilakukan secara demokratis dan menghindari unsur paksaan. Setiap individu juga memiliki kebutuhan, masalah, bakat, minat, dan potensi yang berbeda. Unsur-unsur pemaksaan melalui berbagai cara perlu dihindari karena bukan menunjukkan ciri dari pemberdayaan.

- b. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu, sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Tahap ini dilakukan secara logis dari yang sifatnya sederhana menuju yang kompleks.
- c. Kegiatan pendamping atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap, dan berkesinambungan. Kesabaran dan kehati-hatian dari agen pemberdayaan perlu dilakukan terutama dalam menghadapi beragam karakter, kebiasaan, dan budaya masyarakat yang sudah tertanam lama.
- d. Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-luasnya. Partisipasi ini mulai dari tahapan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, termasuk partisipasi dalam menikmati hasil dari aktivitas pemberdayaan.
- e. Agen pemberdayaan atau petugas yang melaksanakan pemberdayaan perlu memiliki kemampuan (kompetensi) yang cukup, dinamis, fleksibel dalam bertindak, serta dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Agen pemberdayaan ini berperan sebagai fasilitator.

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan kepada pihak yang lemah, dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang terlalu berkuasa sehingga terjadi keseimbangan (Djohani, 2003). Pengertian pemberdayaan tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya.

Menurut (Anwas, 2014) Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri.

Menurut (Parsons, 1994), pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi

perhatiannya. Selanjutnya menurut (Ife, 1995), pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.

Secara lebih rinci (Slamet, 2003) menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu disini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil risiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif.

Dengan demikian pemberdayaan merupakan salah satu upaya untuk memperkuat lembaga kemasyarakatan agar mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang mengalami kondisi kesulitan untuk keluar dari zona kemiskinan.

Sedangkan indikator pemberdayaan menurut (Suharto, 2011) paling tidak memiliki empat hal, yaitu: merupakan kegiatan yang terencana dan kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, serta dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise dalam (Sutrisno, 2005) ada lima macam yaitu:

1. Pendekatan dari bawah: pada kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Partisipasi: dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
4. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.
5. Keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.

Delivery dalam (Sutrisno, 2005) menyatakan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah: mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara keberlanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, dan meningkatkan tingkat keberlanjutan.

Menurut (Suharto, 2006) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau modal saja, tetapi harus diikuti pula

dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi (Widjaja, 2003).

Menurut (Kartasmita, 1996) upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong (*encourage*), memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran (*awreness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik (irigasi, jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawah. Terbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan.
3. Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

Proses pemberdayaan warga masyarakat diharapkan dapat menjadikan masyarakat menjadi lebih berdaya berkekuatan dan berkemampuan. Kaitannya dengan indikator masyarakat berdaya, (Sumardjo, 1999) menyebutkan beberapa ciri warga masyarakat berdaya yaitu :

1. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan),
2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri,
3. Memiliki kekuatan untuk berunding,
4. Memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerja sama yang saling menguntungkan, dan
5. Bertanggung jawab atas tindakannya.

(Slamet, 2003) menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, paham termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu berbagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil risiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggung jawab.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Sebaiknya orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara komulatif sehingga semakin banyak keterampilan yang dimiliki oleh seseorang semakin baik pula kemampuan berpartisipasinya.

Menurut Moelyarto dalam (Wahyono, 2001) pengertian pemberdayaan masyarakat mengacu pada kata “empowerment” yaitu, sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (*self-reliant communities*) sebagai suatu sistem yang mengorganisasikan diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat seperti itu diharapkan memberikan peran kepada individu bukan sebagai objek tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup mereka.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (*people-centered development*) ini kemudian melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal (*community-based resource management*) sebagai mekanisme

perencanaan yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial (*social learning*) dan strategi perumusan program. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasi dirinya (*empowerment*).

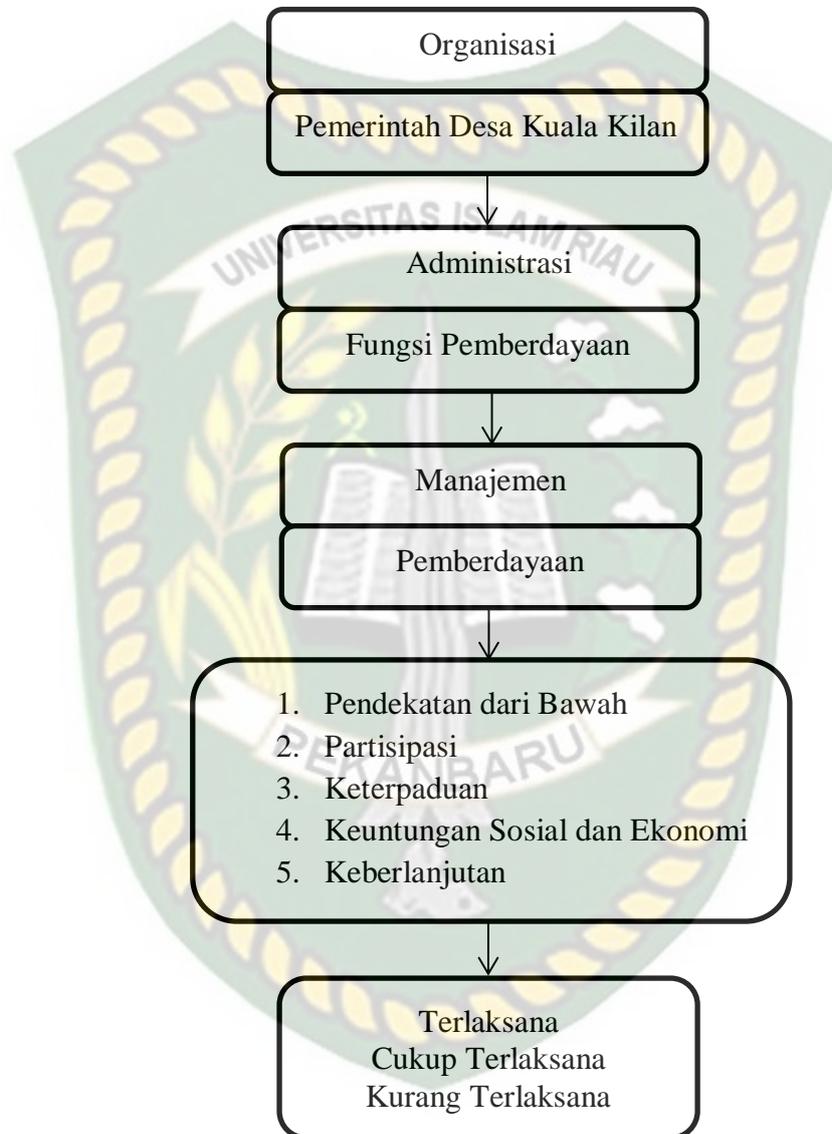
Soegijono dalam (Soekamto, 2004) menyatakan terdapat tiga pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat miskin, yaitu:

1. Pendekatan yang terarah, artinya pemberdayaan masyarakat harus terarah yakni berpihak kepada orang miskin
2. Pendekatan kelompok, artinya secara bersama-sama untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi
3. Pendekatan pendampingan, artinya selama proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat miskin perlu didampingi oleh pendamping yang profesional sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator terhadap kelompok untuk mempercepat tercapainya kemandirian.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikiran dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai variabel penelitian beserta indikator-indikator yang terkait di dalam variabel penelitian. Kerangka pikiran pada variabel penelitian tentang *Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu* secara lebih rinci dapat dilihat pada bagan yang digambarkan di bawah ini, yaitu:

Gambar II.1 Kerangka Pikir Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu



Sumber: Modifikasi Penulis 2020

C. Hipotesis

Menurut Sakaran dalam (Noor, 2011) mendefinisikan hipotesis sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkap dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.

Berdasarkan kerangka pikir yang dijelaskan sebelumnya maka dapat ditemukan hipotesis sebagai berikut: *“Diduga Pelaksanaan Fungsi Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu belum efektif”*.

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari dan menghilangkan dari kesalahan pemahaman tentang beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa konsep operasional. Untuk lebih jelasnya peneliti memberi batasan berupa konsep operasional.

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan suatu operasional.

1. Administrasi merupakan kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya didalam organisasi.
2. Organisasi merupakan wadah kegiatan-kegiatan administrasi dan rangkaian hierarki dan interaksi antara orang-orang didalamnya.

3. Manajemen merupakan suatu rangkaian proses yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Karena manajemen merupakan akumulasi dari kemampuan dan keahlian dalam mencapai tujuan organisasi.
4. Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja.
5. Pelaksanaan/implementasi maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan dan melengkapi. Jadi secara etimologi implementasi (pelaksanaan) itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Administrasi pembangunan adalah proses pembangunan yang menerapkan nilai-nilai administrasi sehingga mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran masyarakat Desa.
9. Pendekatan dari bawah yaitu pada kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian

mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam pengembangan gagasan ada 3 langkah yang harus dilakukan antara lain adalah: menentukan masalah, membatasi masalah dan merumuskan masalah. Selanjutnya pembangunan bertahap merupakan proses kelanjutan, peningkatan, perluasan dan pembaharuan pembangunan.

10. Partisipasi yaitu dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan. Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program / proyek pembangunan yang dikerjakan dimasyarakat lokal.
11. Keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional. Keterpaduan merupakan proses menyelaraskan berbagai aktivitas dan keperluan pembangunan desa dari berbagai organisasi desa.
12. Keuntungan sosial dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaan. Keuntungan sosial yaitu untuk mengangkat kesejahteraan sosial seperti terpenuhi kebutuhan dasarnya. Keuntungan ekonomi yaitu untuk meningkatkan pendapatan perkapita penduduk atau masyarakat.
13. Keberlanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.

E. Operasionalisasi Variabel

Tabel II.1 Variabel Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa (Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 12).	Pemberdayaan Masyarakat	1. Pendekatan dari Bawah	1. Pengembangan gagasan 2. Kegiatan bertahap	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		2. Partisipasi	1. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan 2. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		3. Keterpaduan	1. Kebijakan pemberdayaan 2. Strategi pemberdayaan	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		4. Keuntungan Sosial dan Ekonomi	1. Manfaat sosial dari pemberdayaan 2. Manfaat ekonomi dari pemberdayaan	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		5. Keberlanjutan	1. Pengembangan kemitraan dengan masyarakat 2. Diterima secara sosial dan ekonomi	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

Sumber: Modifikasi Penulis 2020

F. Teknik Pengukuran

Untuk mempermudah dalam menganalisis Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku, maka perlu adanya teknik pengukuran yang jelas yang dapat dinilai melalui indikator berikut :

a. Ukuran Variabel

Terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori terlaksana berada pada rentang 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori cukup terlaksana berada pada rentang 34%-66%.

Tidak Terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori kurang terlaksana berada pada rentang skor 1%-33%.

b. Variabel Indikator

1. Pendekatan dari bawah yaitu pada kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori terlaksana berada pada rentang 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori cukup terlaksana berada pada rentang 34%-66%.

Tidak Terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori kurang terlaksana berada pada rentang skor 1%-33%.

2. Partisipasi yaitu dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan. Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program / proyek pembangunan yang dikerjakan dimasyarakat lokal.

Terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori terlaksana berada pada rentang 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori cukup terlaksana berada pada rentang 34%-66%.

Tidak Terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori kurang terlaksana berada pada rentang skor 1%-33%.

3. Keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional. Keterpaduan merupakan proses menyelaraskan berbagai aktivitas dan keperluan pembangunan desa dari berbagai organisasi desa.

Terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori terlaksana berada pada rentang 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori cukup terlaksana berada pada rentang 34%-66%.

Tidak Terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori kurang terlaksana berada pada rentang skor 1%-33%.

4. Keuntungan sosial dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaan. Keuntungan sosial yaitu untuk mengangkat kesejahteraan sosial seperti terpenuhi kebutuhan dasarnya. Keuntungan ekonomi yaitu untuk meningkatkan pendapatan perkapita penduduk atau masyarakat.

Terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori terlaksana berada pada rentang 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori cukup terlaksana berada pada rentang 34%-66%.

Tidak Terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori kurang terlaksana berada pada rentang skor 1%-33%.

5. Keberlanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.

Terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori terlaksana berada pada rentang 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori cukup terlaksana berada pada rentang 34%-66%.

Tidak Terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori kurang terlaksana berada pada rentang skor 1%-33%.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang penulis kemukakan adalah mengenai Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk menelaah permasalahan yang diangkat dalam penelitian, maka penulis melakukan analisis data menggunakan tipe penelitian survey deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi pada saat penelitian dengan cara menumpulkan data, mengklasifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh perumusan analisa terhadap masalah yang dihadapi kemudian dapat diambil suatu kesimpulan. Kemudian untuk metode penelitian ini digunakan metode kuantitatif yaitu penelitian yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya dan bertujuan untuk menggambarkan dan menggunakan teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu sebagai lokasi penelitian. Adapun yang menjadi pertimbangan penulis dalam penentuan lokasi penelitian yakni yang melakukan pemberdayaan masyarakat dalam hal ini ialah pemerintah desa. Berdasarkan fenomena yang ada penulis melihat pelaksanaan fungsi dari pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat belum efektif.

C. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kuantitatif, jika dirancang sebagai sebuah penelitian survei keberadaan populasi dan sampel nyaris tak dapat dihindarkan. Populasi dan sampel merupakan sumber utama untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam mengungkapkan fenomena atau realitas yang dijadikan fokus penelitian. Demi mencapai keakuratan validitas data yang dihasilkan populasi dan sampel yang dijadikan objek penelitian harus memiliki kejelasan baik dari segi ukuran maupun karakteristiknya. Apabila seseorang ingin melakukan penelitian semua elemen adalah wilayah penelitian, maka penelitian merupakan penelitian populasi. Populasi adalah subjek suatu penelitian yang memiliki karakteristik yang homogen. Dalam arti lain adalah sekelompok orang atau perkumpulan orang yang mempunyai karakteristik persamaan dalam sebuah organisasi, dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Kepala Desa dan Aparat Desa di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu.

Sampel itu sendiri adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat menggambarkan populasinya. Adapun yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Masyarakat.

Untuk lebih jelasnya tentang populasi dan sampel penelitian ini dapat dilihat pada tabel III.1 berikut ini:

Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Untuk Pemerintah Desa, Bidang Pemberdayaan dan Masyarakat Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat

No	Unit Sampel	Populasi	Sampel	Persentase
1	2	3	4	5
1	Kepala Desa	1	1 orang	100 %
2	Aparat Desa	7	7 orang	100 %
3	Masyarakat	370 KK	18 orang	5 %
Jumlah			26 orang	

Sumber: Olahan Penelitian, 2020

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel atau teknik sampling merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik Sampling merupakan teknik pengambilan sampel dalam penelitian untuk menentukan sampel yang akan diteliti.

Dalam melakukan penelitian Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu ini, penulis menggunakan 2 (dua) penarikan sampel yaitu teknik Sampling Jenuh (sensus) dan teknik *Simple Random Sampling*.

Menurut (Sugiyono, 2012) Sampling Jenuh (sensus) merupakan teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dalam hal ini, penulis menetapkan untuk menggunakan teknik sampling jenuh yaitu pada Kepala Desa dan Aparat Desa Kuala Kilan.

Adapun teknik *Simple Random Sampling* pada penelitian ini digunakan terhadap masyarakat Desa Kuala Kilan dengan mengambil secara acak tanpa

harus mempertimbangkan strata yang ada pada populasi tersebut. Dalam hal ini, masyarakat terdiri dari 3 orang pengusaha dan 15 orang petani.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Dalam penelitian ini data primer berupa data yang diperoleh dari narasumber yakni Kepala Desa Kuala Kilan, Aparat Desa dan Masyarakat.
2. Data sekunder adalah data dari pihak kedua berupa keterangan-keterangan yang relevan dapat menunjang objek penelitian ini meliputi : Buku-buku hasil penelitian, Dokumentasi resmi dari pemerintah, data sekunder yang diperoleh dari pemerintah Desa Kuala Kilan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung yakni metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan pengamatan langsung tentang perubahan fenomena-fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut, bagi pelaksana observasi untuk

melihat obyek moment tertentu, sehingga mampu memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan.

2. Kuisisioner

Kuisisioner adalah pengumpulan data dengan menyebarkan suatu daftar pernyataan yang telah ditentukan kategori jawabannya dan menyebarkan kepada responden untuk diisi sesuai dengan jawaban yang telah disediakan.

3. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara yakni proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilaksanakan secara terstruktur, dimana peneliti menyediakan pedoman pertanyaan dan pertanyaan diajukan kepada informan untuk mendapat jawaban atas permasalahan yang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu merupakan bukti fisik dari penelitian ini, berupa foto-foto penelitian dan surat-surat/dokumen-dokumen yang telah diperoleh selama penulis melakukan penelitian. Dokumentasi ini juga dilakukan sebagai bukti dari hasil observasi yang peneliti lakukan.

G. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber sehingga proses ini diartikan sebagai proses dimana adanya upaya mengolah suatu data menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dengan tujuan mendeskripsikan data, membuat induksi maupun penarikan kesimpulan tentang karakteristik populasi. Sesuai dengan tujuan yang dikemukakan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dengan menggunakan teknik ini dimana penulis mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana fakta tersebut dilihat dari teori yang bersifat mendukung.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan tabel mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut :

Tabel III.2: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
		Januari-Agustus				September				Oktober-November				Desember				Januari-November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																				
2	Seminar UP					■																			
3	Revisi UP									■	■	■	■												
4	Kuisisioner																	■							
5	Rekomendasi Survei																					■			
6	Survei Lapangan																					■			
7	Analisis Data																					■			
8	Penyusunan Skripsi																					■			
9	Konsultasi Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■
10	Ujian Skripsi																							■	
11	Revisi Skripsi																							■	
12	Penggandaan Skripsi																							■	

Sumber: Medifikasi Penulis, 2020

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu

Pembentukan Kabupaten Indragiri Hulu pada awalnya ditetapkan dengan UU No. 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah yang diberi nama Kabupaten Indragiri yang meliputi wilayah Rengat di sebelah Hulu dan Tembilahan di sebelah Hilir. Pada tahun 1965 Kabupaten Indragiri telah dimekarkan menjadi Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan UU No. 6 Tahun 1965. Pada tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dipecah lagi menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kuansing yang berkedudukan di Taluk Kuantan dan Kabupaten Indragiri Hulu berkedudukan di Rengat. Pada tahun 2004 mengalami beberapa pemekaran wilayah Kecamatan sehingga menjadi 14 kecamatan:

1. Kec. Rengat ibukota Rengat
2. Kec. Rengat Barat, ibukota Pematang Reba
3. Kec. Seberida, ibukota Pangkalan Kasai
4. Kec. Batang Gangsal, ibukota Seberida
5. Kec. Batang Cenaku, ibukota Aur Cina
6. Kec. Pasir Penyu, ibukota Air Molek
7. Kec. Lirik, ibukota Lirik
8. Kec. Kelayang, ibukota Simpan Kelayang
9. Kec. Peranap ibukota Peranap
10. Kec. Batang Peranap, ibukota Pematang

11. Kec. Rakit Kulim, ibukota Petonggan
12. Kec. Sungai Lala, ibukota Kelawat
13. Kec. Lubuk Batu Jays, ibukota Lubuk Batu Tinggal
14. Kec. Kuala cenaku, ibukota Kuala Cenaku

Secara geografis Kabupaten Indragiri Hulu berada pada posisi 0° LU- $102^{\circ} 20'$ LS dan $102^{\circ} 10'$ BT - $102^{\circ} 48''$ BB meliputi wilayah seluas 7.676,26 km² (767.626,66 Ha). Kabupaten ini ditandai dengan iklim tropis basah dengan suhu berkisar antara 23.20 C - 31.70 C. Rata-rata curah hujan mencapai 2.520,8 mm/tahun. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret hingga Agustus. Berikut ini adalah batasan-batasan Kabupaten Indragiri Hulu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Tebo, Provinsi Jambi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir

Letak Kabupaten Indragiri Hulu yang dekat dengan Pantai Timur Pulau Sumatera dan berada pada bagian hilir dari alur Sungai Indragiri menyebabkan wilayah Kabupaten Indragiri Hulu pada umumnya merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 5 sampai dengan 400 meter dari permukaan laut.

Selain itu, kondisi topografi Kabupaten Indragiri Hulu yang demikian menyebabkan hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Indragiri Hulu memiliki potensi terhadap terjadinya bencana banjir. Potensi banjir tersebut tidak hanya

disebabkan oleh faktor topografi wilayah yang rendah tapi juga dikontribusi oleh banjir kiriman dari daerah lain, mengingat beberapa sungai di daerah ini hulunya berada pada daerah lain. Diantara sungai yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki peranan penting dan strategis adalah Sungai Indragiri dengan panjang \pm 550 Km. Karena, Sungai Indragiri bukan saja melintasi Kabupaten Indragiri Hulu tetapi juga beberapa Kabupaten lainnya di Provinsi Riau, bahkan hulunya berada pada Danau Singkarak yang merupakan wilayah Propinsi Sumatera Barat. Jika dilihat dari posisi wilayah sungai mulai dari hulu sampai ke hilir, maka letak wilayah Kabupaten Indragiri Hulu berada pada bagian hilir Sungai Indragiri. Selain memberikan berkah, Sungai Indragiri juga sering mendatangkan musibah bagi kehidupan masyarakat Indragiri Hulu terutama yang tinggal disepanjang aliran sungai tersebut.

Pertumbuhan ekonomi yang masih mengandalkan pada eksploitasi sumberdaya alam telah menyebabkan laju degradasi lingkungan yang semakin cepat. Dampak nyata yang dirasakan di Kabupaten Indragiri Hulu adalah terjadinya pendangkalan Sungai Indragiri yang diakibatkan dari pemanfaatan sumberdaya lahan yang kurang terkendali baik untuk pemukiman, perkebunan, lahan pertanian maupun aktivitas masyarakat lainnya. Akibatnya kemampuan sungai untuk menampung volume air semakin menurun dan pada musim penghujan volume air yang melebihi daya tampung sungai menyebabkan terjadinya bencana banjir. Disisi lain, pada musim kemarau wilayah Kabupaten Indragiri Hulu yang pada umumnya merupakan rawa bergambut juga berpotensi

terjadinya kebakaran lahan yang bukan saja berdampak negatif terhadap aspek kesehatan tapi juga menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.

B. Gambaran Umum Kecamatan Batang Cenaku

Kecamatan Batang Cenaku dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09 Tahun 2000, tentang Pembentukan Kecamatan Batang Cenaku. Kecamatan Batang Cenaku Merupakan Pemekaran dari Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, maka pada tanggal 8 November 2000, Bupati Indragiri Hulu Meresmikan Kecamatan Batang Cenaku.

Jumlah Penduduk Kecamatan Batang Cenaku pada Tahun 2018 berjumlah 38.984 jiwa, yang terdiri dari 19.860 jiwa laki-laki dan 19.124 jiwa perempuan. Wilayah Kecamatan Batang Cenaku pada umumnya beriklim kering dengan penyebaran curah hujan tidak merata. Curah hujan tertinggi di Kecamatan Batang Cenaku biasanya terjadi pada bulan Oktober, November dan Desember antara 8-10 hari/bulan. Berikut ini adalah batasan-batasan Kecamatan Batang Cenaku:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Rakit Kulim
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Wilayah Provinsi Jambi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Pranap
- Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Batang Gangsal dan Seberida

Kecamatan Batang Cenaku adalah bagian dari Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Indragiri Hulu, dengan luas Wilayah 634,43 Km² yang terbagi atas 20 Desa, yaitu:

1. Desa Aur Cina
2. Desa Alim
3. Desa Anak Talang
4. Desa Batu Papan
5. Desa Bukit Lingkar
6. Desa Bukit Lipai
7. Desa Cenaku Kecil
8. Desa Kerubung Jaya
9. Desa Kepayang Sari
10. Desa Kuala Gading
11. Desa Kuala Kilan
12. Desa Lahai Kemuning
13. Desa Pejangki
14. Desa Pematang Manggis
15. Desa Petaling Jaya
16. Desa Puntianai
17. Desa Sanglap
18. Desa Sipang
19. Desa Talang Bersemi
20. Desa Talang Mulya.



C. Gambaran Umum Desa Kuala Kilan

1. Sejarah Desa Kuala Kilan

Secara administrasi kewilayahan, Desa Kuala Kilan berada dalam wilayah Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Desa Kuala Kilan adalah desa yang terbentuk akibat adanya program transmigrasi Pemerintah. Tahun 1982 mulai didatangkan masyarakat dari Pulau Jawa ke Desa ini. Awalnya pola transmigrasi desa ini adalah transmigrasi umum, namun pada tahun 1996 kemudian menjadi pola PIR dengan Perkebunan Sawit sebagai penghasilan masyarakat.

Nama Desa Kuala Kilan berasal dari nama dari salah satu sungai yang ada di Desa Kuala Kilan. Yakni sungai yang melintasi di sepanjang desa Kuala Kilan dan Desa Aurcina tersebut. Nama Kuala Kilan diresmikan oleh pemerintah kabupaten indragiri hulu pada tanggal 04 April 1968.

Desa Kuala Kilan dengan luas wilayah 20.000 km² mempunyai keadaan geografis yang sangat baik dalam bidang perkebunan. Sebagian besar mata pencarian masyarakat ini bersumber dari hasil perkebunan sawit dan ada juga yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil dan buruh harian lepas.

Perekonomian di Desa Kuala Kilan pada umumnya tergantung perkebunan sawit, umumnya setiap warga memiliki lahan perkebunan sawit yang sudah didapatkan sejak terbentuknya desa ini

Desa kuala kilan telah dipimpin kepala desa sebanyak 4 kepala desa sampai saat ini. Kepala Desa pertama dipimpin oleh bapak Rambun, kepala desa

kedua dipimpin bapak Ali Akbar, kepala desa ketiga dipimpin bapak Sarwendi, kepala desa keempat dipimpin bapak Juindra.as, kepala desa kelima sampai saat ini dipimpin oleh bapak Ardiyonto.

Warga desa Kuala Kilan awalnya adalah warga Pribumi dan transmigrasi dengan total penduduk 370 kk yang terdiri dari berbagai macam suku bahasa. Yakni suku Melayu, jawa, suku sunda,minang, suku batak, suku madura dll.

Agama yang dianut adalah agama islam, agama katolik, agama kristen dengan latar belakang pada saat itu profesi petani.

2. Demografi Desa Kuala Kilan

a. Batas Wilayah Desa

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Beligan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Aur Cina
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kuala Gading
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pejangki

b. Luas Wilayah Desa

- | | | |
|-------------------------|---|---------|
| 1) Pemukiman | : | 55 ha |
| 2) Pertanian/Perkebunan | : | 1105 ha |
| 3) Ladang/tegalan | : | 3 ha |
| 4) Hutan | : | 150 ha |
| 5) Rawa-rawa | : | 5 ha |
| 6) Perkantoran | : | 6 ha |
| 7) Sekolah | : | 1 ha |
| 8) Jalan | : | 4 ha |

9) Lapangan sepak bola : 2 ha

c. Orbitasi

- 1) Jarak ke Ibu Kota Kecamatan terdekat : 2,5 km
- 2) Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 5 Menit
- 3) Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 125 km
- 4) Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 90 Menit

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

- 1) Kepala Keluarga : 370 KK
- 2) Laki-laki : 552 Jiwa
- 3) Perempuan : 582 Jiwa
- 4) Jumlah : 1133 Jiwa

3. Keadaan Penduduk Desa Kuala Kilan

a. Pendidikan

- 1) SD/ MI : 270 Orang
- 2) SLTP/ MTs : 160 Orang
- 3) SLTA/ MA : 120 Orang
- 4) S1/ Diploma : 15 Orang
- 5) Putus Sekolah : 40 Orang
- 6) Buta Huruf : 20 Orang

b. Lembaga Pendidikan

- 1) Gedung TK : 1 buah/ Lokasi di Dusun II
- 2) SD/MI : 1 buah/ Lokasi di Dusun III
- 3) SLTP/MTs : 0 buah/ Lokasi di Dusun

- 4) SLTA/MA : 0 buah/ Lokasi di Dusun
- 5) PDTA : 1 buah/ Lokasi di Dusun II

c. Pertanian

- 1) Padi Sawah : 0 ha
- 2) Padi Ladang : 0 ha
- 3) Palawija : 1 ha
- 4) Kakao/ Coklat : 1 ha
- 5) Sawit : 800 ha
- 6) Karet : 300 ha
- 7) Kelapa : 2 ha
- 8) Singkong : 1 ha
- 9) Lain-lain : ha

d. Peternakan

- 1) Kambing : 78 ekor
- 2) Sapi : 430 ekor
- 3) Kerbau : 100 ekor
- 4) Ayam : 780 ekor
- 5) Itik : 370 ekor
- 6) Lain-lain : ekor

e. Struktur Mata Pencaharian

- 1) Petani : 735 orang
- 2) Pedagang : 120 orang
- 3) PNS : 20 orang

- 4) Tukang : 30 orang
- 5) Guru : 25 orang
- 6) Bidan/ Perawat : 10 orang
- 7) TNI/ Polri : 3 orang
- 8) Pesiunan : 0 orang
- 9) Sopir/ Angkutan : 15 orang
- 10) Buruh : 65 orang
- 11) Jasa persewaan : 35 orang
- 12) Swasta : 100 orang

4. Pembagian Wilayah Desa

Desa Kuala kilan terbagi ke dalam 3 Dusun terdiri dari :

- a. Dusun I : Jumlah 1 RW dan 2 RT
- b. Dusun II : Jumlah 2 RW dan 5 RT
- c. Dusun III : Jumlah 1 RW dan 2 RT

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

- a. Lembaga Pemerintah Desa
 - 1) Kepala Desa : 1 Orang
 - 2) Sekretaris Desa : 1 Orang
 - 3) Perangkat Desa : 23 Orang
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : 5 Orang
- c. Lembaga Kemasyarakatan
 - 1) LPM : 1 Kelompok
 - 2) PKK : 1 Kelompok

- 3) Posyandu : 1 Kelompok
- 4) Pengajian : 2 Kelompok
- 5) Arisan : 3 Kelompok
- 6) Simpan Pinjam : 1 Kelompok
- 7) Kelompok Tani : 2 Kelompok
- 8) Karang Taruna : 1 Kelompok
- 9) Lain-lain : 0 Kelompok

Gambar IV.1: Bagan Struktur Organisasi Desa Kuala Kilan



Sumber: Kantor Desa Kuala Kilan, 2020

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Pada bab V ini penulis akan menjelaskan atau menggambarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, sebelum menjelaskan hasil penelitian terlebih dahulu menjelaskan identitas responden yang penulis anggap merupakan hal yang penting dalam penelitian. Adapun identitas responden sebagai berikut:

1. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur

Umur merupakan salah satu faktor yang cukup menentukan semangat kerja seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya, selain itu umur juga dapat berpengaruh pada produktifitas kerjanya, pada tabel berikut penulis akan memamparkan identitas responden berdasarkan umur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.1 : Identitas Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Tingkat Umur

No	Umur Responden	Jumlah	Presentase
1.	21-30 Tahun	6 Orang	23.1%
2.	31-40 Tahun	5 Orang	19.2%
3.	41-50 Tahun	12 Orang	46.1%
4.	51-60 Tahun	3 Orang	11.6%
Jumlah		26 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, Tahun 2020

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 26 orang responden, maka didapatkan bahwa : 6 orang (23.1%) adalah responden dengan umur 21-30 tahun, 5 orang (19.2%) adalah responden dengan umur 31-40 tahun, 12 orang (46.1%) adalah responden dengan umur 41-50 tahun, 3 orang (11.6%) adalah responden dengan umur 51-60 tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa identitas responden berdasarkan umur lebih didominasi oleh responden yang berumur 41-50 tahun.

2. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Identitas responden berdasarkan jenis kelamin sangat penting dilakukan, untuk menjelaskan populasi yang akan dijadikan responden pada penelitian ini, pada tabel berikut penulis akan memaparkan identitas responden berdasarkan jenis kelamin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.2 : Identitas Responden Tentang Analisis Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Laki-Laki	24 Orang	92.3%
2.	Perempuan	2 Orang	7.7%
Jumlah		26 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden berdasarkan jenis kelamin yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 24 orang (92.3%) adalah responden laki-laki dan 2 orang (7.7%) adalah responden perempuan.

3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan penting bagi suatu bangsa dan suatu urusan untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan.

Dengan adanya tingkat pendidikan ini akan memberikan gambaran terhadap tingkat kebenaran, oleh karena itu dalam pelaksanaan penelitian ini pendidikan merupakan langkah awal yang harus di penuhi. Hal ini dapat di lihat dari jumlah responden yang di golongan dalam tingkat pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.3 : Identitas Responden Tentang Analisis Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	SLTP	11 Orang	42.3%
2.	SLTA	12 Orang	46.1%
3.	S1	3 Orang	11.6%
Jumlah		26 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat di lihat bahwa responden dengan tingkat pendidikan SLTP adalah sebanyak 11 orang (42.3%), responden dengan tingkat pendidikan SLTA adalah sebanyak 12 orang (46.1%), responden dengan tingkat pendidikan S1 adalah sebanyak 3 orang (11.6%).

B. Hasil dan Pembahasan

a. Proses Penelitian Pemberdayaan Masyarakat

Melaksanakan pemberdayaan merupakan tugas pemerintah desa terutama kepala desa disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai mana Pasal 26 ayat (1) bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemberdayaan di Desa Kuala Kilan yaitu pembentukan bank sampah dan koperasi desa dalam usaha fotokopi dan pom minyak bensin mini. Untuk melihat Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa

Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, maka penulis uraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan dari Bawah

Pendekatan dari bawah yaitu pada kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam pengembangan gagasan ada 3 langkah yang harus dilakukan antara lain adalah: menentukan masalah, membatasi masalah dan merumuskan masalah. Selanjutnya kegiatan bertahap merupakan proses kelanjutan, peningkatan, perluasan dan pembaharuan pembangunan.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai jawaban responden tentang Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.4 : Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Indikator Pendekatan dari Bawah

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pengembangan Gagasan	7 (26.9%)	19 (73.1%)	-	26 (100%)
2	Kegiatan Bertahap	11 (42.3%)	15 (57.7%)	-	26 (100%)
Jumlah		18	34	-	52
Rata-Rata		9	17	-	26
Persentase		34.6%	65.4%	-	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, Tahun 2020

Dari data tabel V.4 diatas maka dapat dilihat jawaban dari 26 responden untuk item penilaian Pendekatan dari Bawah dengan 34.6% responden yang menjawab terlaksana, kemudian 65.4% responden yang menjawab cukup terlaksana, dan tidak ada responden yang menjawab kurang terlaksana. Berikut penulis uraikan dari setiap item penilaian.

Pada item penilaian pertama yaitu pengembangan gagasan dengan 26.9% responden yang menjawab terlaksana dengan alasan pengembangan gagasan sudah berjalan dengan baik, kemudian 73.1% responden yang menjawab cukup terlaksana dengan alasan pengembangan gagasan sudah terlihat dan tidak ada responden yang menjawab kurang terlaksana.

Selanjutnya pada item penilaian kedua yaitu kegiatan bertahap dengan 34.6% responden yang menjawab terlaksana dengan alasan kegiatan bertahap sudah berjalan dengan baik, kemudian 65.4% responden yang menjawab cukup

terlaksana dengan alasan kegiatan bertahap sudah terlihat dan tidak ada responden yang menjawab kurang terlaksana.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kepala Desa yaitu Bapak Ardianto selaku Kepala Desa Kuala Kilan yang dilakukan pada tanggal 12 Desember 2019 beliau mengatakan:

“Dalam setahun sekali kami mengadakan rapat desa untuk membahas perencanaan desa untuk satu tahun kedepan, yang mana pada rapat tersebut dihadiri oleh perangkat desa serta masyarakat untuk menyampaikan gagasannya mulai dari pembangunan fisik maupun non fisik desa”.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan diperoleh informasi mengenai pendekatan dari bawah bahwa dari pelaksanaan rapat desa yang menghadiri rapat tersebut hanya 40% (40 orang) dari jumlah undangan yang telah diberikan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk indikator Pendekatan dari Bawah dalam Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu berada pada kategori Cukup Terlaksana yaitu sebesar 65.4%.

2. Partisipasi

Partisipasi yaitu dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan. Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan dimasyarakat lokal.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai jawaban responden tentang Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.5 : Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Indikator Partisipasi

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan	2 (7.7%)	11 (42.3%)	13 (50%)	26 (100%)
2	Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan	2 (7.7%)	7 (26.9%)	17 (65.4%)	26 (100%)
Jumlah		4	18	30	52
Rata-Rata		2	9	15	26
Persentase		7.7%	34.6%	57.7%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, Tahun 2020

Dari data tabel V.5 diatas maka dapat dilihat jawaban dari 26 responden untuk item penilaian Partisipasi dengan 7.7% responden yang menjawab

terlaksana, kemudian 34.6% responden yang menjawab cukup terlaksana, dan 57.7% responden yang menjawab kurang terlaksana. Berikut penulis uraikan dari setiap item penilaian.

Pada item penilaian pertama yaitu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dengan 7.7% responden yang menjawab terlaksana dengan alasan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan sudah berjalan dengan baik, kemudian 42.3% responden yang menjawab cukup terlaksana dengan alasan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan sudah terlihat, dan 50% responden yang menjawab kurang terlaksana dengan alasan masih banyaknya masyarakat yang apatis terhadap perencanaan pembangunan desa.

Selanjutnya pada item penilaian kedua yaitu keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dengan 7.7% responden yang menjawab terlaksana dengan alasan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan sudah berjalan dengan baik, kemudian 26.9% responden yang menjawab cukup terlaksana dengan alasan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan sudah terlihat, dan 65.4% responden yang menjawab kurang terlaksana dengan alasan masih banyaknya masyarakat yang apatis terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kepala Desa yaitu Bapak Ardianto selaku Kepala Desa Kuala Kilan yang di lakukan pada tanggal 12 Desember 2019 beliau mengatakan:

“Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, serta rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa, contohnya saja seperti dalam rapat desa masyarakat yang diundang mencapai 100 orang tetapi yang datang hanya 40 orang, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa yang telah direncanakan pemerintah desa”.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan diperoleh informasi mengenai partisipasi bahwa minimnya partisipasi masyarakat dalam rapat desa membuat hanya sedikit masyarakat yang mengetahui tentang pemberdayaan masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan berjalan sangat lambat.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk indikator Partisipasi dalam Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu berada pada kategori Kurang Terlaksana yaitu sebesar 57.7%.

3. Keterpaduan

Keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional. Keterpaduan merupakan proses menyelaraskan berbagai aktivitas dan keperluan pembangunan desa dari berbagai organisasi desa.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai jawaban responden tentang Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa

Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.6 : Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Indikator Keterpaduan

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Kebijakan pemberdayaan	-	9 (34.6%)	17 (65.4%)	26 (100%)
2	Strategi pemberdayaan	-	10 (38.5%)	16 (61.5%)	26 (100%)
Jumlah		-	19	33	52
Rata-Rata		-	9.5	16.5	26
Persentase		-	36.5%	63.5%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, Tahun 2020

Dari data tabel V.6 diatas maka dapat dilihat jawaban dari 26 responden untuk item penilaian Keterpaduan dengan tidak ada responden yang menjawab terlaksana, kemudian 36.5% responden yang menjawab cukup terlaksana, dan 63.5% responden yang menjawab kurang terlaksana. Berikut penulis uraikan dari setiap item penilaian.

Pada item penilaian pertama yaitu kebijakan pemberdayaan tidak ada responden yang menjawab terlaksana, kemudian 34.6% responden yang menjawab cukup terlaksana dengan alasan kebijakan pemberdayaan sudah terlihat, dan 65.4% responden yang menjawab kurang terlaksana dengan alasan kebijakan pemberdayaan belum tepat sasaran.

Selanjutnya pada item penilaian kedua strategi pemberdayaan tidak ada responden yang menjawab terlaksana, kemudian 38.5% responden yang menjawab cukup terlaksana dengan alasan strategi pemberdayaan sudah terlihat, dan 61.5% responden yang menjawab kurang terlaksana dengan alasan strategi pemberdayaan belum tepat sasaran.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kepala Desa yaitu Bapak Ardianto selaku Kepala Desa Kuala Kilan yang dilakukan pada tanggal 12 Desember 2019 beliau mengatakan:

“Pemberdayaan seharusnya dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, tetapi karena Lembaga Pemberdayaan Masyarakat belum memahami tugas dan tanggung jawabnya, sehingga pemberdayaan masyarakat saya yang melakukan langsung. Sedangkan Lembaga Pemberdayaan masyarakat hanya terlibat pada saat rapat desa saja”.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan diperoleh informasi mengenai keterpaduan bahwa lembaga pemberdayaan masyarakat kurang memahami tugas dan fungsinya sehingga pemberdayaan dilakukan oleh kepala desa.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk indikator Keterpaduan dalam Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa

Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu berada pada kategori Kurang Terlaksana yaitu sebesar 63.5%.

4. Keuntungan Sosial dan Ekonomi

Keuntungan sosial dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaan. Keuntungan sosial yaitu untuk mengangkat kesejahteraan sosial seperti terpenuhi kebutuhan dasarnya. Keuntungan ekonomi yaitu untuk meningkatkan pendapatan perkapita penduduk atau masyarakat.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai jawaban responden tentang Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.7 : Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Indikator Keuntungan Sosial dan Ekonomi

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Manfaat sosial dari pemberdayaan	-	3 (11.5%)	23 (88.5%)	26 (100%)
2	Manfaat ekonomi dari pemberdayaan	-	2 (7.7%)	24 (92.3%)	26 (100%)
Jumlah		-	5	47	52
Rata-Rata		-	2.5	23.5	26
Persentase		-	9.6%	90.4%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, Tahun 2020

Dari data tabel V.7 diatas maka dapat dilihat jawaban dari 26 responden untuk item penilaian Keuntungan Sosial dan Ekonomi dengan tidak ada responden

yang menjawab terlaksana, kemudian 9.6% responden yang menjawab cukup terlaksana, dan 90.4% responden yang menjawab kurang terlaksana. Berikut penulis uraikan dari setiap item penilaian.

Pada item penilaian pertama yaitu manfaat sosial dari pemberdayaan tidak ada responden yang menjawab terlaksana, kemudian 11.5% responden yang menjawab cukup terlaksana dengan alasan manfaat sosial dari pemberdayaan sudah terlihat, dan 88.5% responden yang menjawab kurang terlaksana dengan alasan masyarakat belum merasakan manfaat sosial dari pemberdayaan.

Selanjutnya pada item penilaian kedua manfaat ekonomi dari pemberdayaan tidak ada responden yang menjawab terlaksana, kemudian 7.7% responden yang menjawab cukup terlaksana dengan alasan manfaat ekonomi dari pemberdayaan sudah terlihat, dan 92.3% responden yang menjawab kurang terlaksana dengan alasan masyarakat belum merasakan manfaat ekonomi dari pemberdayaan.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kepala Desa yaitu Bapak Ardianto selaku Kepala Desa Kuala Kilan yang di lakukan pada tanggal 12 Desember 2019 beliau mengatakan:

“Pemberdayaan masyarakat yang kami lakukan dalam bidang sosial seperti pembentukan bank sampah, sedangkan dalam bidang ekonomi kami ada

koperasi desa dalam usaha fotokopi dan pom minyak bensin mini, karena partisipasi masyarakat masih rendah membuat pemberdayaan berjalan lambat”.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan diperoleh informasi mengenai keuntungan sosial dan ekonomi bahwa kegiatan pemberdayaan dalam bidang sosial telah dibentuk bank sampah, namun pengelolaan bank sampah dan partisipasi yang masih rendah, serta lokasi yang kurang strategis membuat bank sampah tersebut berjalan dengan lambat. Sedangkan dalam bidang ekonomi ada koperasi desa dalam usaha fotokopi dan pom minyak bensin mini yang baru beroperasi awal tahun 2020.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk indikator Keuntungan Sosial dan Ekonomi dalam Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu berada pada kategori Kurang Terlaksana yaitu sebesar 90.4%.

5. Keberlanjutan

Keberlanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai jawaban responden tentang Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.8 : Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Indikator Keberlanjutan

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pengembangan kemitraan dengan masyarakat	1 (3.8%)	13 (50%)	12 (46.2%)	26 (100%)
2	Diterima secara sosial dan ekonomi	3 (11.5%)	21 (80.8%)	2 (7.7%)	26 (100%)
Jumlah		4	34	14	52
Rata-Rata		2	17	7	26
Persentase		7.7%	65.4%	26.9%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, Tahun 2020

Dari data tabel V.8 diatas maka dapat dilihat jawaban dari 26 responden untuk item penilaian Keberlanjutan dengan 7.7% responden yang menjawab terlaksana, kemudian 65.4% responden yang menjawab cukup terlaksana, dan 26.9% responden yang menjawab kurang terlaksana. Berikut penulis uraikan dari setiap item penilaian.

Pada item penilaian pertama yaitu pengembangan kemitraan dengan masyarakat dengan 3.8% responden yang menjawab terlaksana dengan alasan pengembangan kemitraan dengan masyarakat sudah berjalan dengan baik, kemudian 50% responden yang menjawab cukup terlaksana dengan alasan pengembangan kemitraan dengan masyarakat sudah dilaksanakan, dan 46.2% responden yang menjawab kurang terlaksana dengan alasan pengembangan kemitraan dengan masyarakat belum maksimal.

Selanjutnya pada item penilaian kedua yaitu diterima secara sosial dan ekonomi dengan 11.5% responden yang menjawab terlaksana dengan alasan pemberdayaan bisa diterima secara sosial dan ekonomi, kemudian 80.8% responden yang menjawab cukup terlaksana dengan alasan pemberdayaan yang dilakukan cukup diterima secara sosial dan ekonomi, dan 7.7% responden yang menjawab kurang terlaksana dengan alasan pemberdayaan belum bisa diterima secara sosial dan ekonomi.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kepala Desa yaitu Bapak Ardianto selaku Kepala Desa Kuala Kilan yang dilakukan pada tanggal 12 Desember 2019 beliau mengatakan:

“Pengembangan kemitraan desa saat ini kami baru selesai mendirikan koperasi desa dalam usaha fotokopi dan pom minyak bensin mini, selain itu bank sampah yang sebelumnya mengalami kendala sekarang telah berjalan dengan baik”.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan diperoleh informasi mengenai keberlanjutan bahwa bank sampah yang dikelola oleh ketua yang baru mulai ada peningkatan, meskipun partisipasi masyarakat masih sedikit.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk indikator Keberlanjutan dalam Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa

Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu berada pada kategori Cukup Terlaksana yaitu sebesar 65.4%.

b. Pencapaian Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mengetahui hasil rekapitulasi dari obeservasi yang penulis lakukan di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu yang mana penulis telah melakukan wawancara langsung kepada Kepala Desa Kuala Kilan dan penulis juga melakukan pengumpulan data kuisisioner kepada kepala desa serta aparat desa, dan masyarakat Desa Kuala Kilan. Berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, maka hasil rekapitulasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.9 : Rekapitulasi Tanggapan Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pendekatan dari Bawah	9 (34.6%)	17 (65.4%)	-	26 (100%)
2	Partisipasi	2 (7.7%)	9 (34.6%)	15 (57.7%)	26 (100%)
3	Keterpaduan	-	9.5 (36.5%)	16.5 (63.5%)	26 (100%)
4	Keuntungan Sosial dan Ekonomi	-	2.5 (9.6%)	23.5 (90.4%)	26 (100%)
5	Keberlanjutan	2 (7.7%)	17 (65.4%)	7 (26.9%)	26 (100%)
Jumlah		13	55	62	130
Rata-Rata		2.6	11	12.4	26
Persentase		10%	42.3%	47.7%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, Tahun 2020

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat disimpulkan bahwa dari seluruh indikator tanggapan responden pegawai terhadap Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, maka didapatkan responden yang menjawab Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat sudah terlaksana 10%, responden yang menjawab Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat cukup terlaksana 42.3%, responden yang menjawab Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat kurang terlaksana 47.7%.

Berdasarkan pada hasil rekapitulasi tersebut, maka didapatkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu kurang terlaksana, dengan 47.7% responden menjawab kurang terlaksana. Hal ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat masih perlu dilakukan perbaikan. Kemudian, hanya sebagian kecil saja masyarakat yang menjawab terlaksana yaitu 10%.

Hal ini dapat dibuktikan pada tahapan pemberdayaan dimulai dari Pendekatan dari Bawah yang mana Kepala Desa masih belum bisa menggali potensi masyarakat dalam melakukan pengembangan gagasan. Selanjutnya Partisipasi yang mana kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, serta rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa. Selanjutnya Keterpaduan yang mana kurangnya koordinasi antara Kepala Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

sehingga pemberdayaan tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya Keuntungan Sosial dan Ekonomi yang mana minimnya pemberdayaan serta partisipasi membuat upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang maksimal. Selanjutnya Keberlanjutan yang mana upaya dalam mengembangkan kemitraan dengan masyarakat agar dapat diterima secara sosial maupun ekonomi harus perlu ditingkatkan.

c. Hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

Hambatan adalah rintangan atau kesulitan yang dirasakan saat melaksanakan tugas atau tanggung jawab. Hambatan akan memiliki dampak yang akan mempengaruhi kelancaran suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Kuala Kilan pasti akan menemui hambatannya.

Beberapa hambatan yang dihadapi pemerintah Desa Kuala Kilan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat:

1. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Kuala Kilan partisipasi masyarakat merupakan hal yang paling penting agar pemberdayaan berjalan lancar, akan tetapi masyarakat di Desa Kuala Kilan yang memiliki sifat apatis terhadap kegiatan di desa, membuat pemberdayaan masyarakat berjalan lambat.

2. Lembaga pemberdayaan masyarakat yang kurang memahami tugas dan fungsinya sehingga Kepala Desa langsung yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Desa Kuala Kilan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran untuk bahan masukan bagi pihak terkait terutama bagi pejabat pemerintah Desa Kuala Kilan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berikut penulis dapat simpulkan hasil penelitian yang terangkum dalam beberapa item berikut ini:

1. Item dari penelitian proses pemberdayaan yaitu pada indikator Pendekatan dari Bawah dalam pemberdayaan masyarakat, masih banyak masyarakat yang tidak datang dalam rapat desa, sehingga membuat terbatasnya input gagasan yang diterima dari oleh pemerintah desa dan proses pergerakan dalam pemberdayaan berjalan lambat, sehingga didapatkan hasil cukup terlaksana.
2. Sedangkan untuk indikator Partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat, hasil penelitian mendapati masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa serta minimnya partisipasi dari masyarakat dalam pemberdayaan dikarenakan masyarakat di Desa Kuala Kilan kurang peduli dengan pembangunan di desanya atau terkesan apatis, akibatnya kurangnya partisipasi masyarakat

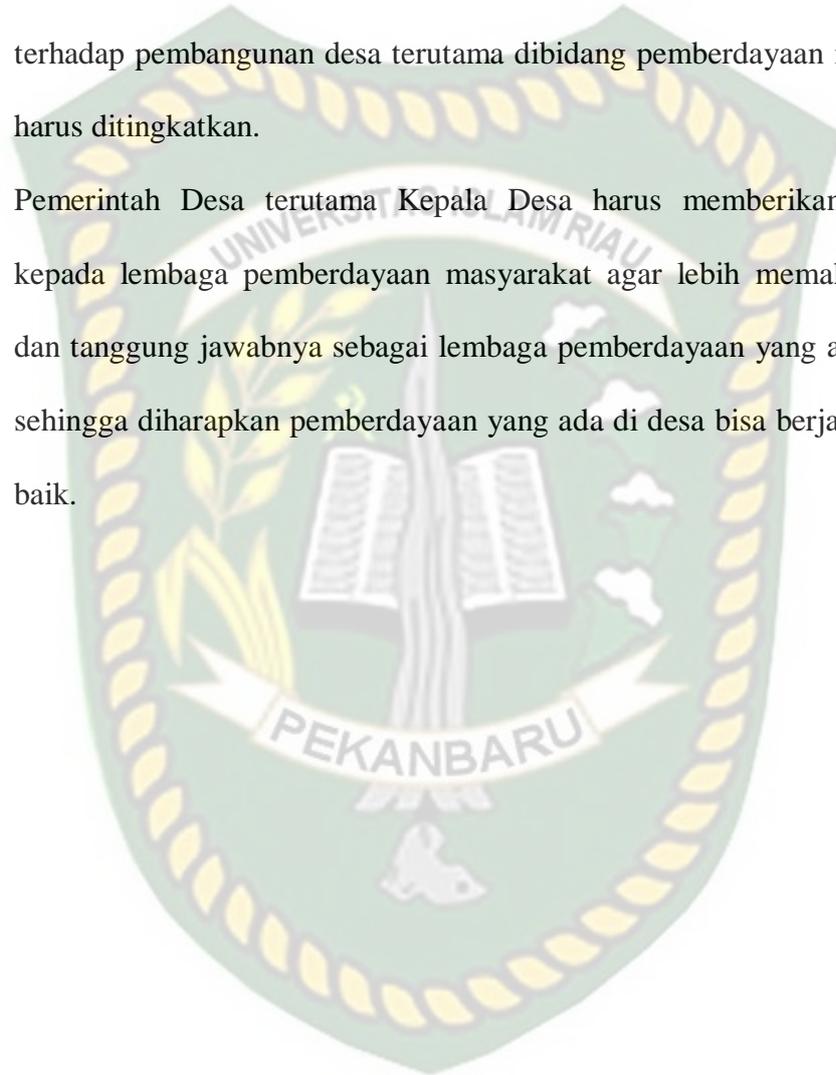
dalam perencanaan pembangunan membuat pelaksanaan pembangunan desa terutama dibidang pemberdayaan tidak berjalan dengan baik, sehingga didapatkan hasil kurang terlaksana.

3. Untuk indikator Keterpaduan dalam pemberdayaan masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat belum memahami tugas dan tanggung jawabnya, mengakibatkan kebijakan dan strategi pemberdayaan masyarakat tidak berjalan dengan baik, sehingga didapatkan hasil kurang terlaksana.
4. Untuk indikator Keuntungan Sosial dan Ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa telah melakukan pemberdayaan masyarakat dibidang sosial dan ekonomi, namun karena partisipasi masyarakat yang masih rendah membuat peningkatan kesejahteraan sosial dan peningkatan ekonomi menjadi minim, sehingga didapatkan hasil kurang terlaksana.
5. Untuk indikator Keberlanjutan dalam pemberdayaan, pemerintah desa telah mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dibidang ekonomi dan sosial, namun partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan tersebut yang masih perlu ditingkatkan, sehingga didapatkan hasil cukup terlaksana.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa terutama Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam mengajak dan mendorong masyarakat agar berpartisipasi dalam rapat desa serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa terutama dibidang pemberdayaan masyarakat harus ditingkatkan.
2. Pemerintah Desa terutama Kepala Desa harus memberikan pelatihan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat agar lebih memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga pemberdayaan yang ada di desa, sehingga diharapkan pemberdayaan yang ada di desa bisa berjalan dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adimihardja. (2004). *Paricipatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Bandung: Humaniora Press.
- Adisasmita, R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anwas, O. M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Bintoro, T. (1995). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hasibuan, M. S. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Munandar, S. M. (1998). *Ilmu Budaya Dasar*. Bandung: Refika Aditama.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Pasolong, H. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, H. (2014). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rivai, V., & Mulyadi, D. (2012). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siagian, S. P. (2003). *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siagian, S. P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2009). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simamora, H. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Slamet, M. (2003). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

- Sumitro, M. (2002). *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suriadi, A. (2005). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Medan: USU.
- Sutrisno, E. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Suyono, H. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Syafri, W. (2012). *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Widjaja, H. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zulkifli. (2005). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen*. Pekanbaru: UIR.
- Zulkifli. (2009). *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Jurnal

- Ayu Purnami Wulandari. 2014. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah Di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Gilang Pramana. 2013. Pembangunan Fisik dan Non Fisik: Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. eJournal Ilmu Adminstrasi Negara. 1 (2). 584-598.

- Jordy Putra Prananda. 2018. Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Tesis. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Kulia Tatik Rohmah. 2016. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. eJournal Unesa. 1(1)
- Misrianto. 2018. Implementasi Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan di Desa Pengkalan Pinang Kecamatan Rupal. Tesis. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Nazlina Mamonto. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menunjang Sektor Pariwisata Sebagai Pendukung Perekonomian (Studi di Desa Mooat Kec. Modayag Kab. Bolaang Mongondow Timur). eJournal Unsrat. 1(1).
- Sukmaniar. 2007. Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca Tsunami Di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Windi Pebriyani. 2017. Analisis Mekanisme Pendeportasian Deteni oleh Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Winona. 2018. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pelatihan Calon Tenaga Kerja Pada Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Wilayah Provinsi Riau. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.